

Penyerahan Rekomendasi Peta Rencana Tata Ruang Massal Tahun 2019 Tahap 1



Foto Suasana Pleno

Dalam rangka percepatan penyelesaian peta rencana tata ruang, PPTRA kembali berinisiatif mengulang kesuksesan proses pleno massal di akhir tahun 2018. Pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2019 bertempat di Grand Kemang Hotel Jakarta, telah terlaksana rapat pleno massal untuk peta rencana tata ruang. Hadir dalam forum tersebut sebelas perwakilan Kabupaten/Kota dan Provinsi dengan jumlah RTR total sebanyak 15 yang mencakup RDTR, RTRW, KSP, dan KEK. BIG menyambut baik perwakilan pemerintah daerah yang antusias dalam forum ini. Seperti yang disampaikan

Kapus PPTRA, Dr. Ir. Mulyanto Darmawan, M.Sc, yang menyatakan kegiatan ini sangat positif dan berharap kegiatan serupa dapat dilanjutkan sebagai sebuah inovasi untuk percepatan penyelesaian peta RTR melalui rekomendasi massal.

Perwakilan pemerintah daerah yang mengawal jenis tata ruangnya dan berpartisipasi dalam pleno massal ini adalah RTRW Kabupaten Temanggung, RDTR Obi dan Labuha Kabupaten Halmahera Selatan, RTRW Kabupaten Wakatobi, RDTR Ngrambe - RDTR Kedunggalar - RDTR Widodaren Kabupaten Ngawi, RDTR Kabupaten Pesisir

Selatan, KSP KP3B Banten - KSP Banten Lama, RTRW Kabupaten Kendal, RTRW Kabupaten Agam, RDTR Tanah Miring Kabupaten Merauke, RDTR Sekitar KEK Mandalika Kabupaten Lombok Tengah serta RTRW Kabupaten Kapuas. Perwakilan pemerintah daerah sangat antusias dalam pleno massal ini.

Turut hadir para peneliti utama sebagai penguji dalam kegiatan ini antara lain Prof.Dr. Fahmi Amhar, Prof. Dr. Dewayani serta peneliti muda Danang Budi Susetyo, ST. PPTRA secara internal juga menghadirkan penguji peta RTR yaitu Ryan Pribadi, ST dan Dra. Niendyawati, M.Sc. [Chintia Dewi, 2019]

Data Rekomendasi Januari-Maret 2019

Provinsi	Kabupaten	RDTR	Tanggal Rekomendasi
Bali	Buleleng	Gerokgak	2019-01-15
Jawa Timur	Pamekasan	Pamekasan	2019-03-05
Maluku Utara	Halmahera Selatan	Obi	2019-03-26
Jawa Timur	Ngawi	Ngrambe	2019-03-26
Jawa Timur	Ngawi	Kedunggalar	2019-03-26
Jawa Timur	Ngawi	Widodaren	2019-03-26
Sumatera Barat	Pesisir Selatan	Kota Kambang	2019-03-26
Papua	Merauke	Tanah Miring	2019-03-26
Maluku Utara	Halmahera Selatan	Labuha	2019-03-26
Nusa Tenggara Barat	Lombok Tengah	KEK Mandalika	2019-03-26



Data Kegiatan Asistensi dan Supervisi Periode Januari - Maret 2019

Peta RTR	Januari	Februari	Maret	Jumlah
RTRW Nasional	0	0	0	0
KS Nasional	1	0	0	1
RTRW Provinsi	0	0	0	0
KS Provinsi	4	0	3	7
RTRW Kabupaten/Kota	29	35	32	96
KS Kabupaten/Kota	7	1	1	9
RDTR	54	53	38	145
Jumlah	95	89	74	258

Provinsi	RTRW	Tanggal Rekomendasi
Banten	Serang	2019-01-17
Sumatera Barat	Sijunjung	2019-01-24
Jawa Timur	Kota Malang	2019-01-29
Papua	Nabire	2019-02-18
Banten	Kota Tangerang Selatan	2019-02-19
Banten	Kota Tangerang	2019-02-26
Kalimantan Tengah	Kota Palangkaraya	2019-03-05
Jawa Tengah	Temanggung	2019-03-26
Sulawesi Tenggara	Wakatobi	2019-03-26
Jawa Tengah	Kendal	2019-03-26
Sumatera Barat	Agam	2019-03-26
Kalimantan Tengah	Kapuas	2019-03-26

Provinsi	KSP	Tanggal Rekomendasi
Banten	KP3B Banten	2019-03-26
Banten	Banten Lama	2019-03-26

Untuk informasi lebih lanjut silahkan hubungi :

PUSAT PEMETAAN TATA RUANG DAN ATLAS
BADAN INFORMASI GEOSPASIAL
Gedung F Lantai 2
Jl. Raya Jakarta-Bogor Km 46, Cibinong, Bogor

Telp - PPTRA : (021) 8764613
Fax - PPTRA : (021) 8764613
Email : redaksi.ptra@gmail.com
Twitter : @pptra_big
Instagram : @pptra_big
http://big.go.id/newsletter/



TATA RUANG & ATLAS NEWSLETTER

MEDIA INFORMASI PEMETAAN TATA RUANG, DINAMIKA SUMBERDAYA, DAN ATLAS



Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Informasi Geospasial (IG) 2019 dilaksanakan di Jakarta 27 Maret 2019, tema yang di usung adalah pembangunan berbasis geospasial. Rapat koordinasi ini mempertemukan pelaku penyelenggaraan informasi geospasial baik di Kementerian/Lembaga (KL) dan Pemerintah Daerah. Tujuan rakornas adalah menyusun rumusan kebijakan nasional bidang IG yang akan disampaikan ke pemerintah melalui Menteri PPN/Bappenas sebagai masukan RPJMN 2020-2024 dan sekaligus menyusun rencana aksi 2020-2024 terkait penyelenggaraan IG dari masing-masing K/L agar tercapai penyelenggaraan IG yang efisien dan efektif.

Dalam sambutan pembukaan, Kepala BIG, Prof. Dr. Hasanuddin Z Abidin menyampaikan fakta bahwa saat ini banyak *working group* yang membahas IG, termasuk *working group* pada

level dunia di bawah koordinasi PBB. Terdapat tren global peningkatan pemanfaatan IG untuk berbagai keperluan. Fenomena seperti Gojek, Gopay, dan layanan aplikasi berbasis peta lain menunjukkan bukti bahwa IG telah menyatu dengan kehidupan sehari-hari manusia. Peningkatan tren pemanfaatan IG untuk berbagai keperluan tematik ini sayangnya tidak diikuti dengan kecepatan penyediaan informasi geospasial dasar, khususnya peta dasar. Padahal undang-undang mewajibkan bahwa penyelenggaraan informasi geospasial tematik wajib mengacu kepada IG dasar. Masih terdapat kendala dalam penyediaan IG dasar termasuk akuisisi, vektorisasi, DEM, citra satelit resolusi tinggi, dan titik referensi. Strategi pemenuhan IG dasar yang diusulkan Kepala BIG yaitu : percepatan penyediaan IG dasar skala besar dan jaring kontrol, integrasi data statistik dan informasi geospasial pada level administrasi terkecil, percepatan penyediaan IG tematik pada skala besar yang mengacu pada IG dasar, dan penguatan infrastruktur IG yang meliputi kelembagaan, standar, SDM, dan peraturan perundangan.

Rakornas IG 2019 ini tentunya adalah forum yang sangat penting sebagai forum

koordinasi antar penyelenggara IG. Hal ini karena inilah tahun penyusunan RPJMN 2020-2024 dimulai yang nantinya akan diharmonisasikan dengan visi misi presiden terpilih. Bila tidak tercatat dalam RPJMN 2020-2024 tentunya sulit bagi K/L mendapatkan pendanaan dalam penyelenggaraan IG. Oleh sebab itu, disadari bukan tugas yang mudah bagi BIG untuk mengkoordinasikan, mencatat dan mengkompilasi program penyelenggaraan IG yang ada di K/L melalui forum Rakornas, tetapi bila gagal melakukan tugas tersebut maka rakornas IG hanyalah forum koordinasi internal BIG saja yang fokus pada program internal, yaitu penyelenggaraan IG dasar yang memang sudah tupoksi BIG. Tentu ini keadaan ini tidak kita inginkan. Terlalu banyak harapan disandarkan pada acara Rakornas IG 2019 ini, semoga forum rakornas ini melahirkan program-program unggulan penyelenggaraan IG dan hasilnya dapat dimanfaatkan oleh banyak pengguna dan komunitas IG. Selamat melaksanakan rakornas. [Mulyanto Darmawan, 2019]



Kebijakan & Isu Strategis

Selama bulan Maret 2019 ini BIG melalui Pusat Pemetaan Tata Ruang dan Atlas telah mengeluarkan sedikitnya lima belas (15) rekomendasi peta tata ruang yang disusun oleh pemerintah daerah, baik tata ruang wilayah provinsi/kabupaten/kota maupun rencana detail tata ruang. Jumlah ini tentu menambah kuantitas wilayah yang telah direkomendasi peta tata ruangnya, status akhir dapat dilihat di tataruang.big.go.id. Peningkatan kualitas peta tata ruang dilakukan melalui pemeriksaan ketelitian geometris, tematik dan aspek kartografis serta kesesuaian antara rancangan perda dengan peta yang digambarkan.

Selain memperhatikan acuan IGD (informasi geospasial dasar), peta tata ruang wajib pula memperhatikan keakurasian tematik. Aspek tematik bahkan menjadi penentu dalam kualitas peta tata ruang yang dihasilkan. Unsur tematik yang wajib ada

adalah keakurasian informasi atau atribut yang dituliskan, terutama informasi jenis bencana, informasi jenis program strategis nasional yang ada, informasi unsur lingkungan, mengakomodir unsur pertanian, dan memperhatikan kawasan lindung.

Beberapa aspek terkait kualitas peta tata ruang yang sering dijumpai dari peta tata ruang yaitu: aspek unsur dasar berupa penarikan deliniasi unsur dasar belum tepat, basis data spasial khususnya toponimi, fasilitas umum dan fasilitas sosial masih belum lengkap, batas administrasi belum definitif, dan garis pantai masih menggunakan data lama. Aspek tematik yaitu: peta tematik terutama jaringan pergerakan belum menggambarkan, Ruang Terbuka Hijau (RTH) minimal 30% sesuai yang diamanahkan, umumnya pemda kesulitan memenuhi angka tersebut, khususnya RDTR yang secara umum masih dibawah 15% dan agak sulit memaksakan 30% kecuali memasukan zonasi LP2B (lahan pertanian pangan berkelanjutan),

karena sebenarnya LP2B adalah lahan yang ditetapkan untuk dilindungi secara konsisten sebagai lahan pertanian pokok, KRB (kawasan rawan bencana) digambarkan pada skala yang tersedia, wilayah sempadan sungai dan pantai tidak digambarkan karena terdapat pemanfaatan lain seperti pemukiman atau penggunaan lain.

Kualitas aspek tematik lain yang sering ditemukan terutama minimnya data satuan kemampuan lahan (SKL) sebagai arahan rencana tata ruang belum menggambarkan atau tidak adanya data rencana pada pola dan struktur ruang, data ruang hanya digambarkan sesuai dengan eksisting pemanfaatan lahan. Aspek kartografis berupa belum sesuai simbol yang digunakan dengan ketentuan yang di atur dalam PP No. 8/2013 tentang ketelitian peta tata ruang. Tata ruang kedepan adalah tata ruang yang memuat keakurasian tematik terukur sejalan dengan adanya peningkatan pada keakurasian unsur dasar. [Mulyanto Darmawan, 2019]

REDAKSI:

| Penanggung Jawab : Kepala Pusat Pemetaan Tata Ruang dan Atlas | Tim Redaksi: Pusat Pemetaan Tata Ruang dan Atlas |
| Editor: Mulyanto Darmawan, Fakhruddin Mustofa, Sri Eka Wati, Randhi Atiqi, Chintia Dewi |
| Desain Tata Letak: Ika Rosalika |

POTRET KEGIATAN PPTRA

Akademisi Timika dikenalkan Manfaat Informasi Geospasial untuk Pembangunan

PDS APS PTR

BIG yang diwakili PPTRA bersama mitra kerja Komisi VII DPR-RI melakukan kunjungan ke Kota Timika, Kabupaten Mimika tanggal 22 Maret 2019 untuk melaksanakan Diseminasi Peran Informasi Geospasial dalam Mendukung Pembangunan. Anggota DPR RI yang hadir adalah Tony Wardoyo, dari daerah pemilihan Provinsi Papua, sekaligus membuka dan mengawali diseminasi. Acara ini diselenggarakan di ruang serbaguna kampus Politeknik Amamapare dengan peserta didominasi dari kalangan mahasiswa dari beberapa perguruan tinggi yang ada di Kota Timika seperti Politeknik Amamapare, STIE Jembatan Bulan dan Universitas Timika.

Pemapar BIG, Mulyanto Darmawan memberikan penjelasan awal mengenai tugas pokok dan fungsi BIG. Beliau juga memaparkan potensi sumberdaya Indonesia, khususnya Timika jika dibandingkan dari negara lain. Melalui peta dapat dilihat secara sederhana potensi sumberdaya dan perbandingan luas antara daerah satu dengan daerah lainnya. Melalui peta pula tersebut dapat diketahui bahwa Kabupaten Mimika memiliki luas wilayah 31,4 kali lebih luas dibanding Negara Singapura. Pada kesempatan ini peserta diyakinkan bahwa potensi sumberdaya yang ada di Kabupaten Mimika bisa melebihi negara-negara maju lainnya.

Setelah mendapat informasi awal mengenai Informasi Geospasial

ToT Pelibatan PPRT dalam Asistensi dan Supervisi Peta Dasar RDTR



Suasana Rapat

Menindaklanjuti hasil rapat tingkat Eselon 1 yang dilaksanakan pada bulan Februari 2019 tentang pelibatan Pusat Pemetaan Rupabumi dan Toponim (PPRT) dalam asistensi tata ruang, maka diselenggarakanlah kegiatan Tot (*training of trainer*). Tot ini berupa transfer pengalaman asistensi peta tata ruang dari PPTRA kepada tim teknis PPRT. Kegiatan berlangsung di Ruang Rapat PPTRA BIG Gedung F Lantai 2, pada tanggal 21 Maret 2018.

Materi yang disampaikan dalam Tot merupakan materi yang sudah biasa dilakukan PPRT dalam pekerjaannya, namun ada perbedaannya karena yang dihadapi tidak hanya konsultan tetapi juga Pemerintah Daerah. Perbedaan dari sisi institusi yang dihadapi terkait pemetaan menjadikan semua pihak di BIG tidak hanya sekadar memeriksa peta tata ruang dan peta dasarnya namun juga memberikan pembinaan sehingga menghasilkan peta tata ruang yang baik.

Ada sekitar 1500 RDTR yang perlu mendapat pelayanan asistensi dan supervisi oleh PPRT. Sebanyak 572 RDTR yang ada masih pada tahapan sumber data (277 RDTR dengan citra yang tidak sesuai spesifikasi dan 295 RDTR dengan citra sesuai spesifikasi namun belum terkoreksi geometris) dan pada tahapan penyelesaian peta dasar masih terdapat 469 RDTR. Sisanya akan diasistensi oleh PPTRA sebanyak 459 RDTR yang telah menyelesaikan peta dasar dan akan berlanjut pada penyusunan peta tematik dan peta rencana. [Adinda Cempaka, 2019]



Suasana ToT

(IG), peserta kemudian dikenalkan pemanfaatan IG untuk pembangunan Wilayah oleh Habib Subagio. Dalam konteks pembangunan wilayah, peran IG adalah untuk mendukung beberapa tujuan pembangunan yaitu: Pengurangan Kesenjangan Antar Wilayah, Pusat-pusat Pertumbuhan berbasis Keunggulan Potensi Wilayah serta Pemerataan Pelayanan Sosial Dasar. Untuk mencapai ketiga tujuan pembangunan tersebut perlu didukung IG yang akurat. Selain itu dengan adanya IG yang dimodelkan secara dinamis juga dapat memprediksi arah pembangunan kedepan, sehingga bisa diketahui dampak pembangunan serta hal apa saja yang dibutuhkan untuk mempercepat pemerataan pembangunan. Karena sebagian besar peserta merupakan akademisi yang ada di Kota Timika dan merupakan generasi penerus bangsa, mereka diajak untuk ikut berperan dalam memajukan Indonesia khususnya daerah asal mereka.

Diakhir kegiatan peserta diajak mengenal Indonesia lebih dekat dengan mengamati Peta NKRI. Beberapa Peta NKRI dan cendera mata dibagikan kepada perwakilan setiap kampus yang ada di Kota Timika. Harapannya mereka akan lebih mengenal Wilayah NKRI serta menumbuhkan rasa cinta pada NKRI. [Noor Adhi Sakti, 2019]



Foto Bersama

Pendampingan Pemeriksaan Pelaksana Pekerjaan Kontraktual PPTRA oleh BPK-RI

Salah satu tugas dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) adalah memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh Lembaga Negara. Guna menyelesaikan tugasnya, BPK-RI memiliki wewenang untuk melakukan pemeriksaan di tempat pelaksanaan pekerjaan. Oleh karena itu pada tanggal 13-14 Maret 2019, BPK-RI melakukan pemeriksaan fisik terhadap dua perusahaan pelaksana pekerjaan kontraktual PPTRA di Kota Bandung. Pemeriksaan dilakukan oleh Saptono selaku ketua tim BPK-RI yang didampingi oleh Inspektorat dan Staf PPTRA BIG. Selain itu dihadiri pula oleh direktur perusahaan dan perwakilan tim teknis kegiatan. Perusahaan yang diperiksa yaitu PT. Baratim Info Bumi KSO PT. Alpicon Agung Permai yang mengerjakan kegiatan "Penyusunan Dataset Peta RDTR Kabupaten/Kota" dan PT. Miranthi Konsultan Permai yang mengerjakan kegiatan "Pemetaan Integrasi Neraca Spasial DAS Ciliwung dan DAS Cisadane". Pemeriksaan dimulai dengan paparan tim teknis mengenai tahapan, metode, sumber data, dan hasil akhir pekerjaan yang dilanjutkan dengan diskusi. Setelah itu dilakukan pemeriksaan dokumen kontrak, seperti kerangka acuan kerja, HPS, personil tim, dan berita acara. Poin penting yang perlu diperhatikan yaitu ketersediaan *logbook* pekerjaan yang berisi mengenai daftar kegiatan personil selama kontrak berlangsung, kontrol kualitas terhadap hasil pekerjaan perusahaan, dan kelengkapan dokumen kontrak. Pemeriksaan lebih lanjut akan dilakukan di kantor BIG untuk menelaah kesesuaian dokumen - dokumen yang telah dikumpulkan. BPK-RI berharap agar staf PPTRA selalu memperhatikan kualitas sumber data maupun metode pengolahan data yang digunakan agar pekerjaan kontraktual di PPTRA menghasilkan informasi akurat dan bermanfaat. [Zidni Farhati Silmi, 2019]



Suasana Pendampingan

PRA RAKORNAS INFORMASI GEOSPASIAL TAHUN 2019



Pra Rakornas

Pra Rakornas (Rapat Koordinasi Nasional) Informasi Geospasial (IG) Tahun 2019 diselenggarakan di Hotel Badakara, Jakarta selama dua hari, 19-20 Maret 2019. Pra Rakornas mempersiapkan perhelatan Rakornas IG yang akan menghasilkan program usulan program kerja terkait IG dari Badan Informasi Geospasial (BIG) dan Kementerian/Lembaga (K/L) yang akan disampaikan kepada Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). Usulan kegiatan beserta penganggarannya akan terintegrasi dengan agenda pembangunan nasional 2020-2024. Sebelum menghasilkan rumusan anggaran dan program, perlu dilakukan penjarangan kebutuhan data terkait IG dari seluruh K/L melalui Pra Rakornas IG.

Acara nasional ini sangat strategis mengingat RPJMN 2019 telah mencapai ujung sehingga penyelenggaraan Pra Rakornas IG dan Rakornas IG Tahun 2019 berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Usulan kegiatan tidak hanya berlaku pada tahun anggaran 2020 saja, akan tetapi menjadi masukan RPJMN 2020-2024 sehingga kegiatannya harus memiliki keberlanjutan dan kesinambungan selama lima tahun. Diharapkan dalam Pra Rakornas IG ini, seluruh kebutuhan IG yang ada di seluruh K/L dapat terjawab dan terpenuhi dalam agenda kerja nasional selama lima tahun kedepan.

Kepala BIG, Prof. Dr. Ir. Hasanuddin Z. Abidin, M.Sc dalam sambutan Pra Rakornas IG menyampaikan bahwa memasuki era Revolusi Industri 4.0, basisdata IG harus ditangani lebih serius agar mampu menjawab kebutuhan pembangunan nasional. Selain itu, Indonesia harus mampu berdaulat atas IG. Namun sebagai negara yang luas, kebutuhan atas IG tidak akan mampu jika hanya dipenuhi oleh BIG saja. Informasi Geospasial Dasar (IGD)

Informasi Pengadaan Jasa Konsultasi Tahun 2019 di PPTRA

Kegiatan Tahun anggaran 2019 telah berjalan di Pusat Pemetaan Tata Ruang dan Atlas (PTRA). Salah satu bagian kegiatan adalah kegiatan kontrak di PPTRA sebanyak tujuh paket pekerjaan. Tujuh paket tersebut adalah Penyusunan Atlas Pendidikan dan Budaya, Pemetaan Integrasi Neraca Spasial WS Bengawan Solo, Pemetaan Integrasi Neraca Spasial WS Cimanuk Cisanggarung, Peta Integrasi Neraca Sumberdaya Alam Lingkup Kabupaten/Kota, Penyusunan Peta Rencana Tata Ruang Terekomendasi Paket 1, Penyusunan Peta Rencana Tata Ruang Terekomendasi Paket 2, dan Penyusunan Peta RDTR Wilayah Perbatasan PKSN Perbatasan Negara. Seluruh paket pekerjaan bersifat Jasa Konsultasi Badan Usaha dengan metode prakualifikasi dua file yang terdiri dari Kualitas dan Biaya.

Pemilihan penyedia dilaksanakan oleh kelompok kerja pemilihan sesuai dengan SK Kepala UKPBJ No. 1 Tahun 2019. Pelaksanaan diawali dengan mengeluarkan pengumuman

prakualifikasi untuk semua paket pekerjaannya. Evaluasi dilakukan untuk dokumen kualifikasi, dokumen penawaran *file 1* (administrasi dan teknis), dan dokumen penawaran *file 2* (Harga). Hasil untuk evaluasi dokumen kualifikasi yaitu satu paket pekerjaan yang pesertanya tidak ada yang lolos kualifikasi sehingga harus dilakukan lelang ulang. Paket pekerjaan yang lolos evaluasi kualifikasi pada saat ini masih dalam tahap Pembukaan dan Evaluasi Penawaran *file 1* (administrasi dan teknis). Beberapa paket pekerjaan memasukan nilai presentasi teknis dalam proses evaluasinya. [I Made Dipta, 2019]



Evaluasi Teknis

berdasarkan Undang-Undang tentang IG menjadi tanggungjawab BIG. Sedangkan Informasi Geospasial Tematik (IGT) dilakukan secara lintas sektoral, BIG berperan sebagai fungsi koordinator dan penyelenggaraan IGT yang belum diselenggarakan oleh K/L. Lalu dalam penyelenggaraannya, IGT harus dibangun diatas IGD untuk menghindari tumpang tindih. Beliau juga memaparkan untuk menjawab kebutuhan kedepan berupa pemetaan pada skala besar perlu dilakukan percepatan IGD skala 1:5.000 untuk mendukung RDTR, pemetaan desa, reforma agraria, pengelolaan gambut, pengelolaan bencana, serta pemenuhan 17 tujuan SDGs berupa integrasi data spasial dan data statistik. Dalam konteks RDTR dan SGDs inilah peran Pusat Pemetaan Tata Ruang dan atlas cukup nyata.

Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam Bappenas, Dr. Ir. Arifin Rudiyanto, M.Sc dalam sambutannya menyampaikan bahwa IG sebagai penggerak pembangunan sehingga memiliki peran yang sangat strategis. Akuisisi data IGD, pemanfaatan teknologi di bidang IG, keterlibatan K/L dalam mengelola IGT, serta diseminasi peraturan perundang-undangan menjadi isu strategis terkait IG. Perlu adanya pemahaman bersama mengenai proses bisnis IG dari hulu hingga hilir agar IG yang dihasilkan berkualitas dan bermanfaat. IG sendiri berperan sebagai alat untuk mengambil keputusan, sehingga semua pengambilan keputusan harus berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan. Sebagai contoh Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang merupakan kajian ilmiah di sektor ekonomi dan sektor lingkungan untuk menggali dampak terhadap ekosistem, polusi, dan sebagainya. Diharapkan hasil Rakornas IG nantinya dapat menghindari duplikasi pekerjaan antar instansi, mendukung pemanfaatan multiguna data dan IG, meningkatkan kualitas dan kuantitas data dan IG, memberikan kemudahan akses, serta meningkatkan kualitas pengambilan keputusan. [Erna Kusumawati dan Rakyani Paksi Nagara, 2019]

GEOLOGI UMUM (Bagian Kedua)

RESENSI BUKU

Geologi banyak manfaat untuk pembangunan dan tata ruang. Data Geologi yang seringkali ditemukan di lapangan cukup banyak dan bervariasi. Untuk itu pemilihan data Geologi yang relevan dengan masalah pembangunan sangat penting untuk dilakukan agar penyelesaian suatu masalah terkait, dapat berjalan secara cepat, efektif, dan efisien. Agar hal tersebut dapat diwujudkan, maka para praktisi Ilmu Kebumihan khususnya, harus menguasai teori-teori dan konsep-konsep geologi yang ada. Buku ini hadir untuk membantu memberikan gambaran terhadap para praktisi Ilmu kebumihan serta masyarakat pada umumnya tentang potensi litosfer dan dinamikanya yang telah membuat manusia hidup dan berkembang dengan memanfaatkan sumber daya geologi, serta bencana yang timbul, baik oleh alam maupun akibat campur tangan manusia.

Pada bagian awal, buku ini menyajikan pembahasan mengenai pengertian tentang data geologi, litosfer, batuan pembentuk litosfer, tenaga eksogen, abrasi dan denudasi, geosinklin, tenaga endogen, serta pengaruh tektonik lempeng pada bencana alam geogene. Selanjutnya, dibahas pula mengenai tektonik lempeng, stratigrafi, serta paleontologi dan neontologi. Pada bagian akhir disampaikan pula bahasan mengenai oksigen, sumber daya geologi, sumber daya mineral, serta bencana dan mitigasi.

Beberapa hal yang telah disampaikan dalam buku ini diharapkan dapat menjadi sebagai salah satu referensi para praktisi Ilmu kebumihan serta masyarakat pada umumnya, serta *stakeholder*, baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah. Pengetahuan tentang geologi yang memadai akan berdampak positif dalam menyusun kebijakan-kebijakan pembangunan dan meminimalisir masalah kebencanaan. [Adinda Cempaka, 2019]

Judul Buku : Geologi Umum (Bagian Kedua)
Penyusun : Sukandarrumidi, dkk
Penerbit : Gadjah Mada University Press
Halaman : xxii + 431 Halaman

